



**JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA**  
e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857  
Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>  
Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 15 No. 1  
Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2355>

## **PERBANDINGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA)**

**Nadira Irsalina<sup>1</sup>, Haura Atthahara<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggowaluyo Teluk Jambe Karawang  
41361, Indonesia

*Email: 191063118098@student.unsika.ac.id*

\*corresponding author

E-mail: 191063118098@student.unsika.ac.id

---

### ***Abstract***

*This study discusses the development of women's participation and justice in political rights in Indonesia and the Philippines. This issue is considered important to be discussed because it relates to gender equality which must be addressed immediately, because it involves human rights. In this study, the author uses a qualitative method, using library research data collection methods namely by collecting data, documents, books, articles and scientific papers, which are in accordance with the object of research, which are then analyzed, reduced, and concluded. The results of this study found that there are similarities and differences with the development of women's participation in Indonesia and in the Philippines, both of which have a history of developing in a better direction. Between the two Philippines countries, it is a country that upholds gender equality, even this is confirmed by the Global Gender Gap Global Economic Forum (WEF) report, based on this fact, it is hoped that it will encourage and motivate Indonesia in terms of gender, especially in the political field.*

***Keywords:*** Indonesia, Philippines, Political,, Gender Equality, Justice.

---

---

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perkembangan partisipasi dan keadilan perempuan dalam hak berpolitik di Indonesia dan Filipina. permasalahan ini dianggap penting dibahas dikarenakan berkaitan dengan kesetaraan gender yang harus ditangani segera, karena menyangkut hak asasi manusia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana perbandingan perkembangan kesetaraan gender dan keadilan perempuan dalam hak maupun partisipasi politik, di kedua negara tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data studi literatur, yakni dengan mengumpulkan data, dokumen, buku, artikel dan karya tulis ilmiah, yang sesuai dengan obyek penelitian, yang kemudian dianalisis direduksi, dan diverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan terhadap perkembangan partisipasi perempuan di Indonesia dan di Filipina, yang keduanya memiliki sejarah yang sampai saat ini makin berkembang ke arah yang lebih baik. akan tetapi diantara kedua negara tersebut Filipina merupakan negara yang paling menjunjung tinggi kesetaraan gender, bahkan hal tersebut ditegaskan dengan laporan Global Gender Gap Global Economic Forum (WEF), berdasarkan fakta tersebut diharapkan akan mendorong dan memotivasi Indonesia dalam hal kesetaraan gender terutama dalam bidang politik.

**Kata Kunci:** Indonesia, Filipina, Politik, Kesetaraan Gender, Keadilan

---

## PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan memberikan gambaran tentang status perempuan dalam masyarakat baik di Indonesia dan Filipina khususnya dalam aspek partisipasi politik, serta membandingkan keduanya sehingga dapat memperoleh inspirasi untuk perubahan di masa depan. Topik ini dianggap penting dan harus dibahas, dan merupakan hal serius yang sering kali kita temui di masyarakat terutama terkait dengan peran perempuan dalam berpolitik. Maka dari itu penulis mengembangkannya lebih lanjut melalui artikel ilmiah ini secara komprehensif. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada pembaca tentang tantangan kesetaraan gender di negara Indonesia dan Filipina, lalu

membandingkan keduanya sehingga dapat saling memberikan gambaran untuk apa yang harus diperbaiki di masa depan.

Secara umum peran perempuan di dunia semakin mengalami perubahan dan kemajuan besar, hal ini tentunya disebabkan oleh tingkat pendidikan kaum perempuan yang sudah hampir setara dengan laki-laki. Selain itu pemikiran dan tindakan kaum perempuan yang sudah banyak terbukti memberikan perubahan yang signifikan dalam suatu bangsa. Tetapi terlepas dari hal tersebut terdapat rintangan besar yang masih ada bagi perempuan untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam politik. Hal ini didasari karena lanskap politik yang masih didominasi laki-laki elit. Meskipun ada peningkatan yang nyata dalam jumlah perempuan yang terpilih dalam jabatan

pemerintahan. tetapi asumsi kepemimpinan institusional tidak serta merta diterjemahkan ke dalam tingkat pengaruh politik yang diharapkan. (Hega, M 2017). Sumber daya juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam partai politik. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat kesulitan dalam akses ke posisi pengambil kebijakan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kekuatan ekonomi, dukungan, dan ketidakpercayaan publik terkait posisi perempuan dalam pemerintahan serta rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab dari terampasnya hak dan kesempatan perempuan dalam berpolitik.

Negara Indonesia sendiri masih belum terlihat kesamaan dan keadilan berpolitik, baik dalam peran serta kedudukannya lembaga pemerintahan sebagai penentu kebijakan masih belum terwujud dan masih tertinggal jauh dari negara lainnya. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang menyangkut harkat dan martabat perempuan dan anak-anak yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif belum jelas penerapannya. Sehingga apabila perempuan tidak terwakili suaranya akan sulit mengharap lahirnya produk hukum yang berpihak pada perempuan, terlebih yang berfokus pada kesetaraan

gender dan keikutsertaan perempuan dalam partai politik, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Bahkan mayoritas kaum perempuan kesulitan mengakses perlindungan hukum melalui otoritas lokal atau sistem peradilan, khususnya daerah pedesaan. Meskipun demikian sudah ada beragam upaya dalam perbaikan partisipasi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Bahkan sejak reformasi, sudah menjadi agenda penting bagi pemerintah dan legislatif. Bahkan hingga saat ini sejumlah kebijakan afirmasi terus diupayakan pemerintah, masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam demokrasi juga harus memegang peranan penting dalam mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas. (St. Habibah, 2015). Dari latar belakang di atas, persoalan ini dibatasi oleh derajat partisipasi dan peran perempuan dalam partai politik dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam partai politik. Meskipun Filipina tampaknya lebih unggul dari negara-negara tetangganya yang memiliki 2 presiden perempuan, tetapi masih ada rintangan besar masih ada bagi perempuan untuk mendapatkan pijakan yang lebih kuat dalam politik. Ribuan wanita didiskriminasi dalam pekerjaan karena pernikahan dan menjadi orang tua. Meskipun jumlah perempuan hampir

setengah dari populasi, tetapi statusnya dalam masyarakat Filipina masih dicirikan oleh kontradiksi yang tajam antara keuntungan yang nyata, di satu sisi, dan ketidaksetaraan yang mencolok. Tetapi hal ini kemudian mengalami kemajuan yang terlihat dari, tambahan politisi dan birokrat perempuan di tingkat nasional dan lokal. dan mulai hadir gerakan perempuan yang luas dan aktif, dan keberadaan undang-undang ketenagakerjaan yang setara yaitu dengan membuat wacana gender dan isu-isu seperti hak-hak reproduksi, antiabuse of women in intim relationship (AWIR), kekerasan dalam rumah tangga, anti prostitusi, anti-perkosaan, dan perdagangan manusia (Hega, M, 2017). Selain itu juga dibentuk Komisi tentang Kesetaraan Pekerjaan Perempuan, amandemen undang-undang anti pelecehan seksual dan bahkan penggunaan anggaran untuk pembangunan dalam hal kesetaraan gender yang efektif.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Partai politik**

Partai politik adalah suatu organisasi yang melakukan berbagai aktifitas politik, dan berusaha untuk menguasai dan menduduki suatu kekuasaan pemerintahan. partai politik juga harus merebut dukungan dari rakyat melalui persaingan dengan golongan lain / partai politik yang

mempunyai pandangan yang berbeda dan tujuan yang sama yaitu menduduki kekuasaan. (Miriam Budiardjo 2008:404). Berdasarkan perspektif kelembagaan, partai politik merupakan mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dengan pemerintah, dan dapat diasumsikan sebagai suatu jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy,1998:11). Partai Politik kemudian didefinisikan sebagai suatu organisasi publik yang memiliki tujuan dalam membawa pemimpinnya untuk berkuasa dan memungkinkan untuk para pendukungnya (politisi) dalam mendapatkan keuntungan lain dari dukungan tersebut dan bertujuan untuk membentuk opini publik (Seilere, 1993).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan partai politik bukan hanya berfungsi untuk menyebarluaskan program kerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah saja, akan tetapi partai politik juga harus memiliki fungsi mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama. Dengan melekatnya fungsi tersebut, partai politik menjadi salah satu aktor penting dalam penegakan demokrasi.

## **Kesetaraan gender**

Caplan (1987) berpendapat bahwa gender merupakan suatu perbedaan sifat dan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain dari perbedaan struktur biologisnya, hal tersebut sebagian besar terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri sosial masing-masing. Istilah "gender" menurut Oakley (1972) mengacu pada perbedaan non-biologis atau gender, dan itu bukan pemberian Tuhan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat para antropolog yang berpendapat bahwa gender bukan didefinisikan secara biologis akan tetapi secara sosial dan budaya.

Kesetaraan gender adalah persamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, yaitu kesamaan dalam berpartisipasi dan berperan dan dalam kegiatan diberbagai bidang seperti, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan negara, keamanan nasional dan kesamaan dalam mendapatkan hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat diwujudkan apabila dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada lagi diskriminasi akibat berbagai perbedaan laki-laki dan perempuan.

## **Partisipasi politik**

Menurut Davis (1989) Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang, dalam situasi kelompok yang menghendaki untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk pencapaian tujuan. (Davis, (1989 : 64). Sedangkan menurut Pabeta (1992) partisipasi secara luas adalah suatu proses / kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar sehingga terlaksananya suatu proses kegiatan tertentu, baik langsung ataupun tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Pabeta (1992 :11). Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik, berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan segala bentuk keikutsertaan dan keterlibatan warga negara biasa atau yang tidak memiliki wewenang, untuk dapat menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya. (Ramlan S, 2005). Sementara itu Yeung dan Mc. Gee (1986) dalam St. habibah 2015 mengemukakan bahwa kategori partisipasi politik adalah sebagai suatu sumbangan pikiran, baik dalam proses perencanaan, dan tanggung jawab Bersama, berupa pendanaan materi dan tenaga yang diperlukan pada semua tahapan kegiatan, serta partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara individual ataupun kolektif. Maka dapat dikatakan

bahwa partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan pada sikap politiknya.

Menurut Myron Weiner, terdapat 5 elemen yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi politik secara luas, anantara lain sebagai berikut:

1. Modernisasi, dalam kehidupan zaman sekarang yang serba canggih dan kemajuan teknologi yang canggih, serta gaya hidup dan pandangan yang semakin maju, dapat menyebabkan masyarakat baik laki-laki perempuan semakin banyak menuntut untuk ikut andil dalam memperebutkan kekuasaan dalam politik.
2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka semakin banyak partisipasi politik dalam publik, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur kelas sosial di masyarakat, yang dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya yaitu tingkat pendidikan yang semakin meningkat, sehingga perlahan menyebabkan kemunculan kelas-kelas baru yang sebelumnya belum pernah ada dalam masyarakat tradisional sebelumnya.
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Melalui kemunculan kaum intelektual dan media komunikasi yang semakin modern, membuat ide demokratisasi partisipasi semakin cepat tersebar ke negara-negara berkembang jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
4. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Partisipasi dalam masyarakat semakin meningkat disebabkan oleh adanya konflik antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Dapat terjadi dikarenakan ketidakpuasan masyarakat akibat dari produk kebijakan tidak sesuai keinginan, yang menyebabkan masyarakat menginginkan perubahan baru dalam masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat mendorong lahirnya partisipasi politik publik
5. Keterlibatan pemerintah secara meluas dalam urusan sosial, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan

kebudayaan yang semakin maju, kemudian menuai desakan pada pemerintah, hingga akhirnya memperluas partisipasi politik masyarakat. Selain itu meluasnya ruang lingkup dan kehidupan yang semakin maju cenderung merangsang timbulnya tuntutan masyarakat untuk ikut andil dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan.

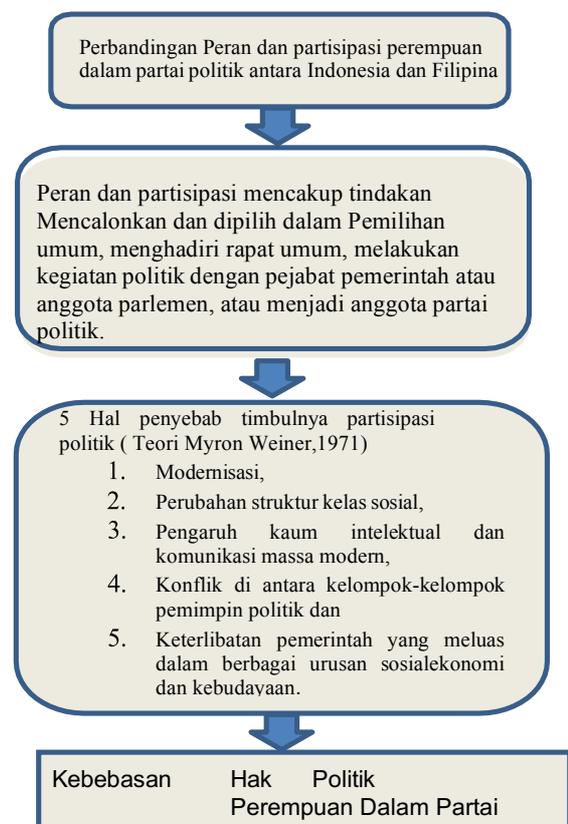
### KERANGKA BERPIKIR

Untuk membandingkan proses dan perkembangan partisipasi perempuan dalam partai politik di Indonesia dan Filipina, Penulis menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Menurut Myron Weiner, (1971). Ada 5 hal yang menyebabkan timbulnya kegiatan partisipasi politik ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu: Modernisasi, Perubahan struktur kelas sosial, Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Perkembangan partisipasi perempuan dalam partai politik tentunya sangat dipengaruhi aspek tersebut, karena menyebabkan timbulnya gerakan yang

lebih luas dalam proses politik, selain itu kelima faktor tersebut yang menyebabkan Partisipasi aktif perempuan dalam politik, untuk memberikan usulan terkait kebijakan pemerintah dan berani untuk mengajukan kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan.

**Diagram 1.** Kerangka berpikir



### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, serta obyek penelitian berfokus pada perkembangan partisipasi perempuan politik di Indonesia dan Filipina.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa referensi seperti, situs internet, media cetak atau website resmi. Serta artikel ilmiah/jurnal, buku cetak ataupun dengan buku elektronik. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan kualitatif, yang dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, kalimat, gambar, dan bukan angka-angka. (Lexy J. M, 2007).

Menurut Myron Weiner, terdapat 5 elemen yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi politik. Maka sesuai dengan kerangka berpikir diatas, penulis mengembangkannya sebagai suatu variabel perbandingan. Penulis berusaha mengulik bagaimana proses demokrasi dikedua negara tersebut berjalan dan berkembang. Kemudian mencari tahu persamaan dan perbedaan proses partisipasi politik perempuan yang dialami oleh kedua negara tersebut. Kemudian penulis berusaha mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi politik perempuan meningkat. Hingga kemudian penulis dapat menyimpulkan langkah yang dapat dilakukan suatu negara dalam meningkatkan keberhasilan partisipasi politik perempuan, berdasarkan keberhasilan yang telah diraih. Serta mengetahui tindakan yang harus

diperbaiki kedepannya,

Sebelum peneliti melakukan telaah bahan bacaan, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari mana sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan serta dijabarkan. sehingga memperoleh gambaran secara utuh terkait permasalahan yang diteliti. Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis terkait fakta yang diperoleh saat penulisan artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari penelitian dan kajian yang telah dilakukan, terlihat beberapa perbedaan dan kesamaan perkembangan partisipasi perempuan dalam partai politik antara Indonesia dan Filipina. Hal tersebut tentunya sangat dipengaruhi faktor-faktor tertentu, yang kemudian menimbulkan gerakan yang lebih luas dalam proses politik, Faktor tersebut menurut teori Myron Weiner, (1971) antara lain sebagai berikut :

### **1. Modernisasi**

Negara Indonesia sendiri pergulatan politik di tingkat manapun hingga saat ini seringkali diwarnai dengan beberapa konflik dan

permasalahan. Salah satunya terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam ranah politik. Isu tersebut dalam masyarakat umum saat ini sering menjadi permasalahan, karena Indonesia masih mengembangkan budaya patriarki, sehingga seringkali memunculkan perselisihan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan proses modernisasi, serta negara yang semakin berkembang, saat ini beberapa konflik di masyarakat sudah cukup jarang ditemukan dan sudah lebih baik dari masa sebelumnya. Terlepas dari itu semua perlu diketahui pula bahwa peranan perempuan dalam ranah politik tidak muncul begitu saja, melainkan sudah ada sejak masa kemerdekaan.

Selain itu pada masa Orde Lama, organisasi perempuan telah banyak bermunculan dan ikut dalam berkiprah di partai politik. Fakta yang sudah lama terjadi tersebut tentunya sudah memperlihatkan bahwa posisi perempuan dalam ranah politik sudah cukup dianggap, walaupun dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dengan laki-laki. Hal itu tentunya sudah lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya yang memandang perempuan, hanya memiliki kewajiban dalam mengurus segala rumah tangga sehingga terjadi pada waktu itu peran perempuan dalam perpolitikan negara hampir tidak terlihat. (Sulastrina, D.

(2021). Setelah kepemimpinan pada masa Orde Baru lengser, dan selanjutnya digantikan dengan masa Reformasi, yang memberikan harapan-harapan baru para perempuan Indonesia dalam memperjuangkan haknya. Dari peristiwa tersebut kemudian lahir organisasi perempuan yang seiring dengan perkembangan modernisasi memunculkan kesadaran bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan eksistensinya dalam ranah politik. Organisasi juga sangat berperan penting dalam kemajuan partisipasi politik perempuan. Organisasi pergerakan perempuan pertama di Indonesia, yaitu bernama Putri Mardika yang didirikan pada tahun 1912 di Jakarta, putri mardika merupakan suatu organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan membimbing para gadis bumiputera untuk menuntut ilmu dan memberikan pendapat di depan umum. (Verelladevanka, 2021). Selain itu, Putri Mardika juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan di Indonesia dan menyadarkan akan pentingnya keterlibatan perempuan diberbagai bidang, termasuk politik dan pemerintahan. Saat perempuan telah memasuki dunia politik kedepannya diharapkan dapat memiliki jiwa besar dan sudah memiliki bekal pemahaman dalam berorganisasi, karena keterwakilan perempuan sekaligus berperan aktif dalam

partai politik sangat jarang dijumpai.

Berikut adalah urutan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2015 yang mana Indonesia menempati urutan ke-92.

Country	GLOBAL INDEX		ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPowerMENT	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Madagascar	74	0.698	59	0.696	95	0.981	90	0.973	80	0.142
Russian Federation	75	0.694	42	0.731	27	1.000	42	0.979	128	0.066
Kyrgyz Republic	76	0.693	80	0.638	81	0.989	79	0.973	76	0.153
Romania	77	0.693	50	0.708	64	0.994	42	0.979	113	0.090
Venezuela	78	0.691	82	0.637	79	0.990	1	0.980	82	0.139
Montenegro	79	0.689	73	0.670	49	0.987	82	0.975	94	0.114
Honduras	80	0.688	101	0.617	1	1.000	81	0.976	74	0.160
Czech Republic	81	0.687	94	0.636	1	1.000	42	0.979	83	0.134
Georgia	82	0.687	60	0.692	31	1.000	120	0.967	114	0.089
Vietnam	83	0.687	41	0.731	114	0.941	139	0.950	88	0.124
Sri Lanka	84	0.686	120	0.577	57	0.995	1	0.980	59	0.193
Brazil	85	0.686	89	0.642	1	1.000	1	0.980	89	0.123
Dominican Republic	86	0.686	86	0.648	91	0.984	98	0.971	81	0.140
Greece	87	0.685	87	0.644	56	0.996	56	0.979	91	0.120
Burundi	88	0.684	23	0.780	70	0.983	131	0.966	145	0.000
Peru	89	0.683	110	0.603	87	0.987	101	0.970	87	0.173
Cameroon	90	0.682	44	0.724	130	0.857	115	0.968	83	0.160
China	91	0.682	81	0.657	83	0.988	145	0.919	73	0.162
Indonesia	92	0.681	114	0.593	89	0.986	60	0.976	71	0.168

**Gambar 1.** TOP 10 Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2015. Sumber: WEF Global Gender Gap Report 2015

Berdasarkan grafik tersebut kesetaraan gender negara Indonesia mendapatkan peringkat ke-92 dari 145 negara. Maka dari itu Kesetaraan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi, terutama keikutsertaan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan

Negara Filipina sendiri, kesetaraan gender sudah cukup dijunjung oleh negaranya, akan tetapi keunggulan tersebut tidak terjadi begitu saja. Terdapat berbagai perubahan yang dilakukan dalam upaya mempromosikan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan. Hal tersebut sudah terlihat dari perempuan

yang telah menduduki posisi tertinggi di dalam pemerintahan selama lebih dari setengah dari tiga dekade terakhir ini. Hal tersebut tentunya menunjukkan tren yang meningkat dalam hal persentase perempuan terpilih dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan pada zaman modernisasi sejarawan masyarakat Filipina Pra-Spanyol telah mendokumentasikan status yang cukup tinggi perempuan Filipina sudah terlihat sebelum penjajahan barat. Hal tersebut ditulis Salazar dalam buku *Filipino Women's Role in History* (1998), yang mana menampilkan potret kuat perempuan Filipina sebagai Babaylan dalam masyarakat, Babaylan merupakan seorang yang berperan sebagai tabib atau peramal disuatu daerah. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan politik tetapi dia cukup dihormati oleh masyarakat sekitar. Keberanian perempuan di Filipina, saat itu juga terlihat dari keberadaan wanita di medan perang, saat revolusi melawan Spanyol dan gerakan perlawanan melawan Amerika dan Jepang. di luar kapal perang senjata, para perempuan telah berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Partai politik perempuan di Filipina pertama muncul setelah 1986 yang disebut Partai Perempuan Gabriela, partai Gabriela merupakan partai sektoral yang memiliki misi untuk

memperjuangkan kesejahteraan kaum perempuan Filipina yang termaginalkan. Partai tersebut muncul di garis terdepan dalam memperjuangkan hak kaum perempuan dan rakyat tertindas lainnya. Hingga Pada tahun 1986, kekuatan mereka berhasil mengakhiri kediktatoran Ferdinand Marcos. Hingga banyak organisasi masyarakat sipil yang kemudian bermunculan untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu ada pula organisasi perempuan WIN (Filipino Women in Nation Building) dan Komisi Nasional Peran Perempuan Filipina, sebelumnya telah mengadakan pelatihan untuk membuat calon perempuan dapat menang dalam pemilu, terutama pada tingkat lokal. Walaupun awalnya banyak bermunculan komentar yang kurang baik akan hal tersebut. Selanjutnya peran perempuan dalam politik pun dibuka oleh gerakan Internasional perempuan lainnya, yang secara signifikan menunjukkan kemajuan di bidang politik, serta dibukanya perluasan partisipasi perempuan dalam politik. Hal itu dinyatakan dalam Deklarasi dan Rencana Aksi Konferensi Beijing pada tahun 1995. dengan berani, Beijing menyerukan 50% keterwakilan perempuan dalam posisi politik (Proserpina D, 2017). Terlepas semua kemajuan ini, ternyata masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam

hal tingkat partisipasi politik perempuan dan laki-laki, yang di mana perempuan sangat kurang terwakilkan suaranya. Bahkan hal itu sudah muncul sejak tahun 1998 hingga 2013. Hal tersebut dibuktikan oleh persentase perempuan yang terpilih sebagai pejabat publik, hanya 16,1 persen hingga 20 persen, mencapai puncaknya pada pemilu 2010. Meskipun Target Pembangunan Milenium (MDG) menargetkan 50 persen jumlah kursi di parlemen nasional pada tahun 2015, akan tetapi Tingkat keterwakilan perempuan saat ini bahkan tidak memenuhi angka 30 persen atau dapat dikatakan sebagai masa kritis. masa kritis dapat dikatakan sebagai persentase minimum yang diperlukan bagi kelompok minoritas untuk dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. (Political commission on women, 2021). Meskipun jumlahnya tidak lebih banyak dari jumlah partisipasi laki-laki, tetapi pada tahun 2011 dan 2012 Forum Ekonomi Dunia telah menunjuk Filipina sebagai negara yang paling menjunjung azas kesetaraan gender di Asia. Bahkan menurut World Economic Forum (2013), perempuan Filipina memegang mayoritas pekerjaan pada kategori pekerjaan legislatif, pejabat tinggi, dan manajerial. Semua pencapaian ini tentunya dapat dikatakan bahwa Filipina

telah mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam meningkatkan kesetaraan gender di negaranya.

Berikut adalah infografis Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2015 yang mana Filipina menempati urutan ke-7.

Global Top 10	
The Global Gender Gap Index	Global rank*
Iceland	1
Norway	2
Finland	3
Sweden	4
Ireland	5
Rwanda	6
Philippines	7
Switzerland	8
Slovenia	9
New Zealand	10

Source: The Global Gender Gap Report 2015  
Note: \*2015 rank out of 145 countries

**Gambar 2.** TOP 10 Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2015

Sumber: WEF Global Gender Gap Report 2015

Berdasarkan data di atas Pada 2015 negara Filipina telah ditempatkan sebagai 7 dari 145 negara yang menjunjung asas kesetaraan gender, menurut Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2016, di antara sepuluh negara yang memiliki kesenjangan yang sangat rendah. Maka hal tersebut dapat dikatakan mendekati kategori kesetaraan gender, berbeda dengan Indonesia yang memperoleh peringkat 92 di tahun yang sama.

## 2. Perubahan struktur kelas sosial

Negara Indonesia sendiri terdapat

faktor yang berpengaruh pada partisipasi politik perempuan, salah satunya yaitu faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Banyak golongan yang menjunjung budaya politik patriarki yang masih kental dan masih banyak ditemukan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan posisi dan peran perempuan dianggap sebelah mata, ketimpangan peran tersebut disebabkan oleh adanya persepsi bahwa kaum laki-laki lebih berkuasa atas perempuan. Budaya patriarki adalah suatu pola dalam suatu sistem di dalam hubungan sosial yang di dalamnya didominasi oleh laki-laki. (Mardhatillah, 2014; Warits, 2012; Yuriadi, 2016). Ketimpangan tersebut hingga sekarang masih kental di Indonesia, di mana posisi kepemimpinan perempuan dalam kelas pekerja dapat dikatakan masih sedikit, walaupun perempuan memainkan peran yang cukup penting dalam perjuangan kelas pekerja. Bahkan budaya patriarki mulai merambah dunia politik, hal tersebut muncul karena adanya persepsi bahwa dunia politik adalah milik kaum laki-laki. Dalam persepsi politik jika hal ini dikaitkan dengan karakteristik perempuan, maka akan ditemukan sebuah kontradiksi, yang mana politik dipersepsikan sebagai dunia yang keras, dan kejam sedangkan perempuan merupakan makhluk yang lemah. (Moh Ikmal, 2019). Dalam hal ini

tentu diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam berkontribusi untuk mewujudkan dan memperbaiki keadaan. Hingga kemudian muncul kelas kaum feminis yang peduli akan pentingnya kesetaraan gender demi membangun watak bangsa, yang kemudian menuntut perubahan yang progresif. Gerakan feminisme di Indonesia muncul dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah akibat kondisi historis perjuangan bangsa, harapan akan program pembangunan nasional, globalisasi, reformasi serta kehidupan religious. Will Durant dalam bukunya “The pleasure of philosophy” berpendapat bahwa peristiwa yang menonjol pada awal era globalisasi tahun 2000, yaitu terjadinya perubahan status perempuan dalam kehidupan sosial. Yang mana golongan sosial tersebut kehadirannya sebagai upaya untuk menjawab berbagai krisis sosial dan perubahan masyarakat. Kemunculan golongan tersebut muncul akibat perubahan pemikiran dan adanya tujuan untuk memujudkan kesetaraan gender.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla pada 2014-2019, Peran perempuan kian cemerlang. Hal tersebut dikarenakan keikutsertaan perempuan dalam ranah politik kini sudah termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e tentang Peserta Pemilu

Anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam keterangan tersebut telah disebutkan bahwa “menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. (Sulastrina, D. (2021). Kebijakan tersebut kini dampaknya saat ini mulai dirasakan perempuan, mereka yang sudah duduk dikursi kekuasaan diharapkan harus senantiasa dapat menunjukkan sisi terbaik dalam dirinya dan harus membuktikan bahwa perempuan dapat menciptakan kemajuan yang pesat dalam pemerintahan, terutama saat duduk di kursi parlemen. Meskipun jumlah keterwakilan perempuan di Indonesia yang telah disediakan 30%, akan tetapi adanya angka tersebut belum sepenuhnya sesuai pada saat implementasinya, dan akan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, serta disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kurangnya kesadaran perempuan akan pentingnya partisipasi politik dan paradigma tentang budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Dengan demikian cepat atau lambat akan mengubah stigma masyarakat, karena tidaklah mudah bila masyarakat kita masih berpikir bahwa politik merupakan wilayah publik yang hanya diisi oleh laki-laki, padahal

perempuan juga berhak untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Hingga kemudian akan menciptakan kesetaraan gender dalam politik, yang membuat perempuan menjadi agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk dapat membuat perubahan menjadi lebih baik (Anifatul K, 2019).

Berikut adalah grafik jumlah perempuan di DPR RI 2019-2024 yang belum mencapai 30% sesuai peraturan mengenai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam parlemen 2019-2024.



**Gambar 3.** Grafik partisipasi perempuan dalam parlemen  
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik diatas terlihat jumlah perempuan dalam DPR RI mencapai 120 orang, atau sekitar 20,87% dari total keseluruhan kursi yang tersedia 575 kursi legislatif. Jumlah perolehan kursi perempuan pada Pemilu 2019 berdasarkan partai politik yaitu, PDIP 26 kursi, Golkar 19 kursi, Demokrat 10 kursi, Gerindra 15 kursi, PKB 12 kursi, NasDem 19 kursi, PKS 8 kursi, PAN 7 kursi, dan PPP 5 kursi.

Berdasarkan data tersebut terlihat

bahwa angka partisipasi perempuan dalam parlemen masih belum mencapai 30%. Akan tetapi berbagai upaya mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia terus ditegakkan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi politik perempuan di ruang publik tersebut adalah dengan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan legislatif, UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan beberapa undang-undang yang lain. Harapannya adalah agar dapat menciptakan perubahan kualitas demokrasi melalui kebijakan yang bersifat regulative yang lebih memihak kepada semua kalangan baik laki-laki dan perempuan. (Moh Ikmal, 2019).

Negara Filipina sendiri faktor penyebab terhambatnya perkembangan partisipasi perempuan tidak jauh berbeda dengan negara Indonesia, yang mana disebabkan oleh budaya dan nilai patriarki yang masih berlaku, dan juga stereotip gender. Serta persepsi bahwa politik itu kotor dan kecenderungan bahwa politik yang ditandai dengan adanya kekerasan dan kekuasaan. Sehingga muncul gagasan bahwa politik

adalah ranah laki-laki daripada perempuan, Hingga kemunculan stereotip gender yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional dan bimbang, sehingga kualitas dalam negosiasi dan pengambilan keputusan banyak diragukan oleh sebagian kelas sosial. (Philippines Comittion Women, 2019).

Meskipun begitu Filipina cukup unggul dalam pergerakan feminis, Bahkan gerakan lebih dahulu muncul dari pada Indonesia, yang dibuktikan dari gerakan perempuan filipina yang telah berkolaborasi dengan gerakan sosial dan telah mampu menumpas berbagai isu terkait bias gender. Hubungan antara feminis dan gerakan sosial tersebut yakni berkaitan dengan adanya isu- isu kelas dan imperialisme yang mampu ditangani dengan cepat oleh kaum feminis Filipina, yaitu dengan mempertahankan pembebasan perempuan dari penindasan patriarkal. Selain dari hal tersebut Filipina juga memegang teguh kepada komitmen Internasional yang diterapkan sehari-hari. komitmen tersebut antara lain CEDAW, Beijing Platform for Action, ASEAN Committee on Women, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Keempat komitmen tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam bentuk lembaga yaitu, Phillipine

Commission on Women (PCW). PCW merupakan lembaga tertinggi dalam urusan kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan di Filipina, khususnya perempuan yang terpinggirkan. Selain PCW, ada pula Republic Act 9170, Magna Carta of Women (MCW), yang merupakan wujud implementasi dan bentuk komitmen Filipina terhadap CEDAW. Di dalam MCW berisi tentang undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak-anak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan.(Camellia N,2018).

Dalam bidang advokasi legislatif, anggota serikat pekerja perempuan telah memberikan peran yang signifikan terhadap berlakunya Undang-undang Republik Filipina 7877 atau Undang-undang Pelecehan Seksual tahun 1995. Undang-undang tersebut kini terus mempengaruhi kode etik tempat kerja dan advokasi serikat pekerja untuk memperbaiki jangkauannya. Dalam 30 tahun terakhir. Wanita Filipina telah berjuang demi Kepentingan

mereka di bidang legislatif, terutama yang berkaitan dengan tentang kontrol dan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender. Tidak dapat disangkal bahwa gerakan perempuan masih aktif dalam bertahun-tahun.

Kondisi tersebut yang kemudian membuat GABRIELA Women's Party (GWP) berjuang melalui jalur intra parlemen. GABRIELA Women's Party (GWP) merupakan suatu sebuah gerakan sosial atau gerakan perempuan yang anti diktator. (Puspitasari, 2019).

**Tabel 1.** Perolehan Jumlah Kursi dan Suara GWP Pemilu 2004-2016

Pemilu	Suara	Persentase	Kursi	Perwakilan di Parlemen
2004 (Kongres 13)	464.586	3,65%	1	Liza Maza
2007 (Kongres 14)	621.171	3,89%	2	Luzviminda Ilagan, Liza Maza
2010 (Kongres 15)	1.001.421	3,31%	2	Luzviminda Ilagan, Emerenciana de Jesus
2013 (Kongres 16)	713.492	2,60%	2	Luzviminda Ilagan, Emerenciana de Jesus
2016 (Kongres 17)	1.367.795	4,22%	2	Emerenciana de Jesus, Ariene Brosas

Sumber: [www.gabrielawomensparty.net](http://www.gabrielawomensparty.net)

Tabel di atas merupakan perolehan suara yang didapatkan oleh GWP berdasarkan 5 kongres terakhir, terhitung sejak tahun 2004-2016. Dari data disimpulkan bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh GWP mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimulai dari mendapat 464.586 tahun 2004, menjadi 1.367.795 pada tahun 2016. Dari perolehan suara tersebut dapat dikatakan bahwa GWP secara politik telah mendapat dukungan dan simpati dari

masyarakat Filipina. Selama GABRIELA Women's Party terlibat dalam proses legislasi, terdapat banyak perubahan yang terjadi di Filipina, hal tersebut membuat reputasi yang bagus sebagai sebuah gerakan sosial. Hal tersebut terlihat dari sebanyak 3.580 pejabat perempuan yang telah menduduki jabatan dalam pemerintahan Filipina, dan 87 perwakilan perempuan yang telah menduduki parlemen pada tahun 2016 (Puspitasari, 2019).

### 3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Negara Indonesia sendiri peran perempuan dalam partai politik dilandasi oleh kepentingan kaum perempuan itu sendiri, dan pemikiran tersebut dapat dipengaruhi oleh kaum intelektual. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya sejumlah LSM dan berbagai organisasi perempuan yang bersifat formal dan non formal, yang dapat menampung berbagai aspirasi dan partisipasi perempuan ke arah pembangunan diri dan politik yang lebih positif. Kemunculan berbagai organisasi dan LSM tersebut merupakan akibat dari tuntutan peran perempuan dalam pembangunan yang kemudian menimbulkan peran ganda bagi perempuan untuk bisa sejajar dengan

laki-laki, tidak hanya disitu, pengaruh kaum intelektual yang semakin maju telah mendorong perempuan untuk melangkah ke dunia politik, hal tersebut merupakan wujud keterwakilan kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik dan kebijakan. Kebijakan tersebut terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban kaum perempuan. Tak hanya itu kaum intelektual sering mengemukakan gagasan dan pandangannya kepada sesama perempuan, hingga kemudian menuntut akan partisipasi masa yang lebih luas dalam politik. Hingga kemudian menuntut perempuan Indonesia untuk bisa dan mampu berperan dalam semua sektor mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Hal tersebut tentunya agar perempuan dapat berkontribusi aktif terhadap Pembangunan negara. Tetapi di sisi lain muncul tanggapan agar perempuan Indonesia sadar dan tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Permasalahan tersebut kemudian yang menimbulkan situasi dilematis yang dihadapi oleh kaum perempuan Indonesia yang berkarier dalam dunia politik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik, yaitu dipengaruhi oleh pendidikan, melalui pendidikan

maka dapat menentukan keaktifan kaum perempuan untuk terlibat dalam partai politik. Tingginya angka pendidikan perempuan kemudian mengubah pola pikirnya untuk ikut terlibat dalam pembangunan negara, hingga kemudian banyak kaum perempuan yang berpendidikan dan saling mempengaruhi sehingga menciptakan kaum intelektual. Kaum intelektual saling bekerja sama, hingga kemudian mendapatkan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan tujuan yang sama.

Berikut adalah grafik peningkatan Pendidikan di Indonesia, sebagai salah satu faktor perubahan struktur kelas sosial masyarakat.



**Gambar 4.** Angka partisipasi sekolah Indonesia menurut Jenjang Pendidikan, 2016-2020

Berdasarkan laporan statistik tentang peningkatan pendidikan Indonesia dari tahun 2016-2020 tersebut, dapat dikatakan pendidikan Indonesia mengalami peningkatan, meskipun jenjang pendidikan SMA/ sederajat belum mencapai 90% dan perguruan tinggi belum mencapai

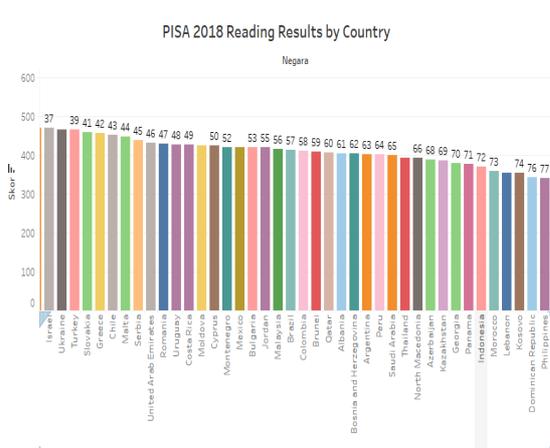
50%, akan tetapi diharapkan kedepannya dapat meningkat. Seperti kita ketahui pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan dengan pendidikan dapat menciptakan kaum intelektual di masyarakat. Selain itu bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kreatif, hingga kemudian dapat menciptakan perubahan bagi bangsa.

Selain itu pentingnya pendidikan dalam partisipasi politik juga ditegaskan dalam International IDEA Conference Report 2002, Strengthening Women's Political Participation In Indonesia Part 1, telah menjelaskan bahwa untuk mendorong peningkatan perempuan dalam partisipasi politik, perlu adanya pemahaman dan analisis dengan menyeluruh hingga kemudian akan menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat. Selain itu banyak argumen yang menjelaskan bahwa pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dan politik, dipengaruhi kondisi empiris, karena terdapat banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan (Artina, 2016). Pada abad pertengahan pada saat perkembangan komunikasi massa modern telah menghasilkan persepsi yang berbeda di masyarakat, terutama

terkait dengan eksistensi kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan di tengah masyarakat memiliki fungsi serta peranan yang sangat penting, salah satunya dalam bidang politik. Pada era komunikasi massa modern banyak kaum perempuan yang berani mengekspresikan pendapat dan pandangannya di ruang publik, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Hal tersebut dapat dikatakan dari masa ke masa telah muncul keberanian perempuan di Indonesia untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa rasa takut. Terkait hal tersebut tentunya sudah ada kemajuan bagi kaum perempuan untuk berani dalam berpendapat. Bahkan dalam undang-undang pun secara jelas dituliskan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan. Dari hal tersebut dapat dikatakan kemajuan komunikasi dan massa modern semakin mempercepat penyebaran gagasan, kritik, saran dan pendapat. Kemajuan komunikasi yang semakin canggih dengan arus globalisasi yang semakin maju, diakui cukup menguntungkan bagi Indonesia karena semua pihak akan dengan mudah dapat mengetahui kinerja pemerintah sehingga akan muncul mekanisme keseimbangan dan kontrol terhadap kekuasaan tersebut. terlepas

dari dampak positif tersebut masyarakat perlu cerdas dalam membedakan berita hoaks dan perlu menghindari berita yang mengandung unsur SARA, pornografi dan konten yang memprovokasi, untuk dapat menghindari hal tersebut Pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Berikut adalah grafik laporan hasil penilaian PISA 2018, PISA merupakan Program Penilaian Pelajar Internasional yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan di dunia.



**Gambar 5.** Grafik laporan hasil penilaian PISA 2018

Sumber: OECD Programme for International Student Assessment (PISA) Report 2018

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa Indonesia mendapatkan peringkat ke 72 yaitu dengan skor 371, berbeda dengan hasil PISA 2015 Indonesia pada kategori membaca yaitu dengan skor 403, maka dapat dikatakan turun sebanyak 32 skor. berbeda dengan negara Filipina yang menempati

peringkat ke 77 dengan skor 340. Meskipun tingkat membaca Indonesia mampu mengungguli negara Filipina akan tetapi hal tersebut harus dievaluasi lebih baik lagi, terutama untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia, dan kita harus berupaya menarik siswa di luar sekolah, untuk kembali ke sekolah.

Negara Filipina sendiri kaum intelektual yang tergabung dalam organisasi mengadakan banyak kegiatan, pelatihan dan memberikan gagasan kepada kaum perempuan di Filipina untuk dapat memperjuangkan haknya. Selain itu bantuan dan bimbingan dari politisi perempuan yang datang juga turut memberikan pendidikan, keahlian dan pengalaman mereka. Salah satunya yang diadakan oleh organisasi perempuan Women in Nation Building dan komisi nasional peran perempuan Filipina, yang mengadakan pelatihan untuk membuat calon perempuan menang dalam pemilu, terutama di tingkat lokal. Keterampilan yang diberikan mencakup keterampilan berbicara di depan umum, keterampilan manajemen waktu, memahami proses hukum, keterampilan konsultasi, dan keterampilan lain yang akan mengasah calon legislator perempuan. Program pelatihan kapabilitas diharapkan akan mendorong politisi perempuan yang lebih

berkualitas dan antusias untuk memasuki arena politik, serta secara khusus menjawab kebutuhan calon politisi/legislator perempuan. Dengan demikian dapat mempromosikan kesetaraan gender tinggi. (Alodia D,2018). Selain itu muncul berbagai organisasi yang peduli terhadap partisipasi perempuan dalam politik Filipina, hingga dibuka oleh organisasi Internasional lainnya. Meskipun hambatan dari segi sosial, ekonomi dan struktural yang menghalangi partisipasi penuh perempuan. Terlepas dari hal tersebut PCW merekomendasikan untuk mengadopsi kuota gender dan tindakan khusus lainnya sebagai tindakan alternatif untuk menyamakan kedudukan dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mencalonkan diri dan terpilih menjadi pejabat publik. (Philippines Comittion Women 2019). Akibat dari gagasan kaum intelektual kini pengakuan dan promosi hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan proses pengambilan keputusan lainnya diabadikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional di mana Filipina menjadi Negara Pihak. Ini termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan, khususnya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). (Philippines commission Women 2019). Selain itu perempuan Filipina juga berjuang dalam memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dari laki-laki. Selain itu para aktivis panuelos, atau perkumpulan aktivis yang mengenakan selendang tradisional Filipina pra kolonial, Mereka pun turut berjuang untuk memenangkan hak pilih perempuan di Filipina.

Seiring dengan berbagai perkembangan zaman banyak bermunculan organisasi penggerak perempuan, sebagai akibat perubahan pemikiran dan adanya tujuan untuk mewujudkan kesetaraan, salah satu perubahan tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor pendidikan, melalui belajar dan membaca yang kemudian berpengaruh pada perubahan pemikiran di tiap individu. Selain itu dalam hal demokrasi pada tahun 2016, terdapat peningkatan ranking demokrasi Filipina yang mana pada tahun 2015 pada peringkat 54, lalu pada tahun 2016 menjadi peringkat 50. Tetapi pada tahun 2017, Filipina mengalami kemerosotan satu digit menjadi peringkat ke 51 di antara 167 negara dengan nilai keseluruhan sebanyak 6,71. Terlepas dari hal tersebut salah satu indikator penentu keberhasilan tersebut salah satunya

adalah kebebasan sipil, kebebasan sipil ini dapat digambarkan berupa kebebasan dalam kebebasan bermedia dan berpendapat. Akan tetapi sektor media pun tak luput dari kenyataan yang kurang baik, meskipun jumlah perempuan yang berpartisipasi dan berpendapat di media telah banyak dan meningkat, tetapi perempuan belum mendapatkan banyak kesetaraan dengan laki-laki dalam hal partisipasi dan pengambilan keputusan.

#### **4. Konflik di antara Kelompok Kelompok Pemimpin Politik**

Negara Indonesia sendiri, seringkali terjadi konflik antar pemimpin-pemimpin politik. Para pemimpin politik tersebut bersaing untuk memperebutkan suatu kekuasaan dan menjalankan strategi dalam mendapatkan dukungan. Dalam mencapai tujuan tersebut mereka kerap melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan masa, salah satunya dengan menyuarakan ide –ide, tujuan dan gagasan pada masa dengan cara apapun atau dapat cara curang sekalipun. Akibat dari hal tersebut kemudian muncul tuntutan terhadap hak – hak rakyat, baik perempuan untuk menjunjung HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun

isu-isu kebebasan pers. (Panji s, 2018). Cara untuk mengatasi konflik yang terjadi diantara kelompok pemimpin politik adalah dengan melakukan negosiasi, karena hal tersebut merupakan cara yang cukup efektif untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Tentunya negosiasi yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal negosiasi ini para pemimpin menciptakan berbagai opini publik bahkan mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima masyarakat, terlepas dari janji-janji tersebut benar-benar terwujud atau tidak. Tetapi jika janji-janji yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan kenyataan tentunya akan menimbulkan protes dan kekecewaan dari masyarakat, apalagi hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat terutama kaum perempuan. Kemudian buah dari kekecewaan tersebut adalah rasa ingin ikut serta dalam memperbaiki dan ikut memberikan gagasan terhadap perbaikan kebijakan pemerintah. Karena

realitas politik di Indonesia harus melibatkan semua kalangan, namun terkadang terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari adanya kekecewaan yang terjadi kepada perempuan maka kemudian muncul kesadaran untuk mengupayakan nasib perempuan dengan melakukan cara tertentu dan membentuk suatu gerakan yang dinamakan gerakan feminisme. Para perempuan yang memiliki nasib sama kemudian dapat memberikan dukungan penuh pada para kandidat perempuan agar percaya diri untuk tampil, dan menunjukkan perubahan yang signifikan. Ketika perempuan telah berkompetisi dengan laki-laki dan kemudian terpilih menjadi legislator. Tentunya dukungan tersebut harus tetap berlanjut dengan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan dan harus dapat memastikan para anggota parlemen perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan reformasi kebijakan dan peraturan perundangan yang terbilang diskriminatif dan tidak berperspektif kesetaraan gender. Legislator perempuan juga dapat membentuk suatu sarana lobi, guna

memastikan bahwa perspektif perempuan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. (Abraham N.2016).

Table 3: Global rankings, 2016 (cont'd)

Country	GLOBAL INDEX		ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPOWERMENT	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Macedonia, FYR	73	0.696	79	0.658	91	0.902	119	0.987	87	0.178
Venezuela	74	0.694	71	0.669	33	0.999	1	0.980	89	0.127
Russian Federation	75	0.691	41	0.722	45	0.997	40	0.979	129	0.066
Romania	76	0.690	54	0.699	68	0.992	40	0.979	112	0.090
Czech Republic	77	0.690	89	0.647	1	1.000	40	0.979	85	0.134
Honduras	78	0.690	96	0.623	1	1.000	59	0.976	75	0.160
Brazil	79	0.687	91	0.640	42	0.998	1	0.980	86	0.132
Peru	80	0.687	111	0.594	80	0.989	100	0.970	60	0.194
Vietnam	81	0.687	83	0.651	72	0.991	76	0.973	87	0.132
Sri Lanka	82	0.685	94	0.628	103	0.930	123	0.967	87	0.136
Bosnia and Herzegovina*	83	0.685	113	0.581	50	0.996	76	0.973	82	0.191
Cyprus	84	0.684	75	0.665	41	0.998	71	0.974	105	0.100
Cameroon	85	0.684	39	0.727	130	0.882	114	0.968	85	0.180
Azerbaijan	86	0.684	38	0.728	83	0.988	138	0.950	124	0.099
India	87	0.683	138	0.468	113	0.950	142	0.942	9	0.433
Indonesia	88	0.682	107	0.598	87	0.987	58	0.976	72	0.168

Berikut adalah Berikut adalah infografis Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2016.

**Gambar 6.** Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2016. Sumber: WEF Global Gender Gap Report 2016

Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan Indonesia menempati urutan 88 sebagai negara yang menerapkan kesetaraan gender paling tinggi, Indonesia dapat meningkatkan ranking dari tahun sebelumnya yaitu 92 dari 145 negara. Kedepannya diharapkan kesetaraan gender di Indonesia akan terus meningkat, meskipun belum dapat menggungguli Filipina, akan tetapi keberhasilan Filipina dalam menerapkan kesetaraan gender patut dijadikan motivasi untuk perbaikan kedepannya.

Sedangkan di Filipina sendiri sudah terlihat kompetisi dalam sistem politik, Hal tersebut terlihat dari

perempuan dan laki-laki yang mulai bersaing dalam memperebutkan dukungan masyarakat. Hal tersebut muncul akibat kesadaran akan nilai dominan dan kebutuhan perempuan yang perlu diberi kesempatan untuk diperjuangkan. Maka dari itu perempuan berhak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam berpartisipasi setara dengan laki-laki, tanpa adanya konflik di antara mereka. Meskipun dalam jangka pendek konflik meningkat, akan tetapi mengarah pada perubahan yang lebih menguntungkan kepentingan perempuan dalam sistem pemerintahan dan politik. (Hernes, 1987: 23 ; Sara S, 2016:17 ). Peran perempuan cukup penting dalam partai politik karena mereka perlu memperhatikan kepentingan politik perempuan dan tidak mengambil risiko bahwa kepentingan mereka akan kalah nilainya dengan kepentingan laki-laki. (Eduards 1991; Sara S, 2016:17).

Wängnerud (1999: 17) menekankan bahwa perempuan dalam politik adalah kelompok yang masih ada dan sering berada di luar proses pengambilan keputusan, karena terdapat konflik kepentingan antara golongan laki-laki perempuan. Hingga kemudian sistem pemerintahan yang didominasi kepentingan perempuan ditekan, Padahal anggota kongres Arlene

Brosas percaya bahwa harus ada kesetaraan gender (50/50) dalam politik di seluruh dunia tidak hanya di Filipina. Senator Loren Legarda dan Risa Hontiveros juga menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tingkat kesetaraan dalam kesempatan partisipasi perempuan di dalam politik, sementara anggota kongres Cesar V. Sarmiento dan Romero Federico "Miro" Saenz Quimbo juga menyetujui hal tersebut. (Sara S, 2016:24).

Berikut adalah infomasi kesenjangan gender menurut Kesenjangan Gender Global Forum

Country	GLOBAL INDEX		ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY		EDUCATIONAL ATTAINMENT		HEALTH AND SURVIVAL		POLITICAL EMPOWERMENT	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Iceland	1	0.874	9	0.806	1	1.000	104	0.970	1	0.719
Finland	2	0.845	16	0.794	1	1.000	1	0.980	2	0.607
Norway	3	0.842	7	0.818	28	1.000	68	0.974	3	0.576
Sweden	4	0.815	11	0.802	36	0.999	69	0.974	6	0.486
Paraguay	5	0.800	8	0.817	110	0.958	89	0.972	8	0.452
Ireland	6	0.797	49	0.709	1	1.000	54	0.979	5	0.502
Philippines	7	0.786	21	0.780	1	1.000	1	0.980	17	0.386
Slovenia	8	0.786	19	0.784	25	1.000	76	0.973	18	0.385
New Zealand	9	0.781	24	0.785	40	0.999	104	0.970	16	0.390
Nicaragua	10	0.780	92	0.632	1	1.000	1	0.980	4	0.506

Ekonomi Dunia (WEF) 2016 yang mana Filipina menempati urutan 7 dan Kembali mempertahankan posisinya.

**Gambar 7.** TOP 10 Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2016.  
Sumber: WEF Global Gender Gap Report 2016

Dari infografis diatas, dapat disimpulkan bahwa Filipina berhasil mempertahankan posisinya kembali dalam hal kesetaraan gender, setelah sebelumnya pada tahun 2015 berada pada posisi ke-7. berdasarkan Laporan

Kesenjangan Gender Dunia (Global Gender Gap tahun 2016). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Filipina merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan wujud kesetaraan gender yang baik bagi untuk ditiru bagi negara Indonesia.

Sebagaimana Hernes (1987:23) menyatakan bahwa masyarakat rugi ketika perempuan tidak berpartisipasi dalam politik, hal tersebut dikarenakan perempuan memiliki pengetahuan nilai dan pengalaman yang berbeda dan tidak dimiliki oleh laki-laki, maka dari itu laki-laki dan perempuan harus bisa saling melengkapi, dan membuat keputusan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. Bahkan Senator Risa Hontiveros dan anggota Kongres Arlene Brosas juga menganggap bahwa pemerintah perlu menjadi representasi asli dari masyarakat dan penduduk. Setengah dari populasi di Filipina adalah perempuan tetapi mereka suara mereka kurang terwakilkan, terutama dalam hal kuantitas (jumlah) dan kualitas (representasi nyata). (Hernes 1987:23; Sara S, 2016:33)

#### **5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam berbagai bidang**

Negara Indonesia sendiri dengan meluasnya ruang lingkup aktivitas

pemerintah seringkali menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir di masyarakat untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal muncul akibat konsekuensi dari ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Dalam aspek urusan sosial suatu pergerakan partisipasi biasanya lahir yang dipicu karena adanya semangat dari masyarakat untuk menuju perubahan ke arah yang lebih adil. Hal tersebut karena adanya struktur sosial yang dianggap masih timpang. Begitu juga dengan lahirnya gerakan perempuan, secara historis lahirnya gerakan perempuan diberbagai negara-negara di dunia disebabkan oleh faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut.

Dalam aspek ekonomi seringkali adanya marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, hal tersebut yang kemungkinan memicu kurang minatnya perempuan dalam politik, maka dari itu peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan demokrasi ekonomi yang dimana terkait dengan tatanan demokrasi ekonomi, sehingga dapat menciptakan partisipasi dan akses yang mudah bagi masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil. Untuk mewujudkan

cita – cita ini, maka pemerintah perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi lokal dengan merata yang akan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Vina R, 2019:38).

Dalam aspek budaya di Indonesia partisipasi politik perempuan terbilang masih rendah, hal tersebut karena berbagai macam-macam faktor, seperti budaya patriarki dan stereotip. Jika dikaitkan dengan unsur budaya, maka akan mengarah pada pembahasan ketidakadilan gender dan dominasi patriarki. Patriarki adalah suatu praktik – praktik sosial dan politik di mana kaum laki – laki cenderung menguasai, menindas, dan mengeksploitasi hak perempuan (Vina R, 2019:38). Maka dari itu untuk memperbaiki hal ini keterkaitan pemerintah adalah dengan menciptakan budaya politik di masyarakat. Budaya politik di Indonesia merupakan suatu perwujudan nilai yang dianut masyarakat yang diyakini sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik negara. (Panji S. 2018:32). Selain itu peran pemerintah juga harus mendorong budaya pancasila di masyarakat, karena hal tersebut sebagai karakter bangsa. Untuk mewujudkan hal ini maka harus ada

sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan hal ini tentunya akan menciptakan karakter bangsa, dan masyarakat khususnya perempuan untuk menopang kesiapan negara dalam kehidupan global.

Sedangkan negara Filipina sendiri, gerakan perempuan yang bergerak saat ini dapat dikatakan dinamis dan terus berkembang. Hal ini tentunya akibat dari produk sejarah dan perjuangan serta dukungan dari pemerintah hasil dari desakan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena Filipina adalah negara yang pernah mengalami masa penjajahan yang kelam cukup di masa lalu. Hingga saat ini semua masyarakat termasuk perempuan melakukan berbagai upaya perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dari upaya tersebut kemudian muncul gerakan perempuan di Filipina, yang mulai berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi, dan berkat adanya dukungan pemerintah Filipina, maka gerakan tersebut masih tetap berjalan hingga saat ini. (Camellia N,2018:21). Gerakan perempuan pun juga telah berkolaborasi dengan banyak gerakan sosial dan juga didukung oleh pemerintah hingga

kemudian mampu mengatasi isu-isu gender dan ketidaksetaraan yang mengubah norma-norma sosial, serta secara efektif mampu mempengaruhi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintah, untuk menuju pencapaian kesetaraan gender, pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif. (Philiphine commission on women, 2019).

Selain itu sudah banyak perempuan Filipina yang memegang pekerjaan di kategori pekerjaan legislatif, pejabat tinggi pemerintahan, dan manajerial. (Sara S,2016:3), Semua hasil ini menunjukkan bahwa adanya dukungan penuh pemerintah terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Bahkan Filipina pernah memiliki dua presiden wanita. Presiden wanita pertama Corazon Aquino, yang berjuang untuk mengatasi masalah ekonomi di Filipina dan memulihkan demokrasi di Filipina. Lalu Presiden yang kedua bernama Gloria Macapagal Arroyo yang mensponsori undang-undang baru, seperti undang-undang hak masyarakat adat dan undang-undang anti pelecehan seksual. Meskipun kedua presiden tersebut berasal dari keluarga dengan kekuatan politik yang kuat akan tetapi keluarganya hanya sedikit berkontribusi untuk memajukan situasi perempuan di negara tersebut. (Presiden Filipina 2006;

Sara S, 2016:4).

Pertumbuhan ekonomi Filipina merupakan hal yang sangat penting bagi partisipasi perempuan dalam politik, hal tersebut dikarenakan sebagai korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan keterwakilan politik perempuan. Dengan ekonomi yang meningkat akan memunculkan beberapa perubahan diantaranya, menyebabkan nilai-nilai tradisional terkait gender berkurang. Hingga kemudian menyebabkan perubahan sikap tentang politisi perempuan, baik dari partai maupun pemilih. Perkembangan ekonomi membuat banyak perempuan yang bisa belajar dan bekerja, serta akses yang mudah sehingga mereka tertarik pada politik (Wide 2006: 93; Sara S, 2016:15). Pemerintah Filipina pun mengadopsi nilai-nilai Internasional yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Nilai tersebut kemudian dijadikan Komitmen Internasional oleh pemerintah Filipina dalam menjalankan program kesetaraan gender di Filipina, komitmen tersebut diantaranya: CEDAW, Beijing Platform for Action, ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children, dan Sustainable Development Goals (SDGs) (PCW, 2016; Camellia N, 2018:42). CEDAW merupakan suatu organisasi

standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, atau sekitar 90% negara-negara anggota PBB (Negara Peserta Konvensi) dan CEDAW telah menetapkan secara universal prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Lundgren, 2017 ; Camellia N, 2018:42). Konvensi ini telah menetapkan bahwa persamaan hak untuk perempuan, dan tidak terlepas dari status perkawinan mereka, dan dalam segala bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, sipil, dan yang paling penting yaitu, budaya. Karena sebagian masyarakat yang masih menjunjung budaya patriarki, konvensi juga mendorong diberlakukannya perundang undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan yang merubah praktek atau kebiasaan dan budaya yang didasari pada inferioritas atau

Rank	Country	Score		Rank change		Score change		
		0-1	2020	2020	2006	0-1	2020	2020
1	Iceland	0.892	0.892	-	+0.016	+0.111		
2	Finland	0.861	0.861	1	+0.029	+0.095		
3	Norway	0.849	0.849	-1	+0.027	+0.050		
4	New Zealand	0.840	0.840	2	+0.041	+0.099		
5	Sweden	0.823	0.823	-1	+0.033	+0.039		
6	Namibia	0.809	0.809	6	+0.025	+0.122		
7	Sierra Leone	0.805	0.805	2	+0.014	n/a		
8	Lithuania	0.804	0.804	25	+0.059	+0.096		
9	Ireland	0.800	0.800	-2	+0.022	+0.066		
10	Switzerland	0.798	0.798	8	+0.019	+0.098		
11	Germany	0.796	0.796	-1	+0.010	+0.044		
12	Nicaragua	0.796	0.796	-7	-0.008	+0.139		
13	Slovenia	0.789	0.789	14	+0.029	+0.081		
14	Spain	0.788	0.788	-6	-0.006	+0.056		
15	Costa Rica	0.786	0.786	-2	+0.003	+0.092		
16	France	0.784	0.784	-1	+0.003	+0.132		
17	Philippines	0.784	0.784	-1	+0.003	+0.032		
18	South Africa	0.781	0.781	-1	+0.001	+0.008		
19	Senegal	0.780	0.780	20	+0.044	n/a		
20	Latvia	0.778	0.778	-9	-0.007	+0.069		
21	Austria	0.777	0.777	13	+0.003	+0.078		
22	Portugal	0.775	0.775	13	+0.001	+0.083		
23	United Kingdom	0.775	0.775	-2	+0.008	+0.038		
79	Thailand	0.710	0.710	-4	-0.003	+0.027		
80	Kazakhstan	0.710	0.710	-8	-0.001	+0.017		
81	Russian Federation	0.708	0.708	-	-0.002	+0.031		
82	Tanzania	0.707	0.707	-14	-0.006	+0.034		
83	Cyprus	0.707	0.707	8	-0.015	+0.034		
84	Malta	0.703	0.703	6	-0.010	+0.051		
85	Uruguay	0.702	0.702	-48	-0.025	+0.047		
86	Paraguay	0.702	0.702	14	+0.019	+0.046		
87	Viet Nam	0.701	0.701	-	-0.002	n/a		
88	Romania	0.700	0.700	-33	-0.024	+0.020		
89	Dominican Republic	0.699	0.699	-3	-0.001	+0.025		
90	Belize	0.699	0.699	20	+0.029	n/a		
91	Venezuela	0.699	0.699	-24	-0.014	+0.032		
92	Lesotho	0.698	0.698	-4	-0.003	+0.017		
93	Brazil	0.695	0.695	-1	-0.004	+0.041		
94	Liberia	0.693	0.693	3	+0.008	n/a		
95	Korea	0.692	0.692	14	+0.021	+0.044		
96	Cameroon	0.692	0.692	-	-0.006	+0.105		
97	Ethiopia	0.691	0.691	-15	-0.015	+0.096		
98	Greece	0.689	0.689	-14	-0.012	+0.035		
99	Hungary	0.688	0.688	6	+0.011	+0.019		
100	Azerbaijan	0.688	0.688	-8	-0.001	n/a		
101	Indonesia	0.688	0.688	-16	-0.010	+0.034		

superioritas salah satu gender atau peran

stereotype untuk perempuan dan laki-laki. (Camellia N, 2018:42).

**Gambar 8.** The Global Gender Gap Index 2021 rankings

Dari informasi gambar 8, dapat disimpulkan bahwa Filipina dan Indonesia mengalami penurunan ranking yang sebelumnya pada tahun 2016 Filipina berada pada urutan ke-7 kemudian tahun 2021 turun menjadi 17 atau turun 10 peringkat. Hal serupa pun terjadi pada Indonesia yang mengalami penurunan yaitu pada 2016 mendapat ranking 88, lalu pada tahun 2021 turun pada peringkat 102 atau turun sekitar 4 urutan. Maka dari itu hal ini harus dijadikan bahan evaluasi bagi Negara Filipina dan juga Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan memperbaiki apa yang kurang dan mempertahankan apa yang sudah baik.

## KESIMPULAN

Terdapat kesamaan antara Filipina dan Indonesia sendiri, yang mana dalam hal partisipasi politik wanita masih sering ditemukan konflik dan permasalahan, salah satunya terkait persepsi bahwa politik itu kotor dan kecenderungan bahwa politik yang ditandai dengan adanya kekerasan. Selain masih terdapat golongan yang masih menjunjung budaya politik patriarki yang masih kental, isu tersebut dalam masyarakat umum saat ini sering

menjadi permasalahan. Akan tetapi hal tersebut tidak begitu mempengaruhi semangat perempuan dalam berkiprah di partai politik. Dari masa ke masa organisasi perempuan telah banyak bermunculan dan ikut dalam berkiprah di partai politik. Fakta saat ini sedang terjadi tersebut tentunya sudah memperlihatkan bahwa posisi perempuan dalam ranah politik sudah cukup dianggap, walaupun dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Terlepas dari kesamaan tersebut Akan tetapi Filipina lebih dahulu telah membuat perubahan yang cukup besar dalam upaya mempromosikan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari perempuan yang telah menduduki posisi tertinggi di dalam pemerintahan selama lebih dari setengah dari tiga dekade terakhir ini, dan tentunya menunjukkan tren yang meningkat dalam hal persentase perempuan terpilih dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan.

Dalam berjuang melalui jalur intra parlemen, Filipina juga jauh lebih unggul daripada Indonesia. hal tersebut Filipina tidak terlepas dari buah pergerakan feminisme. yang dibuktikan dari gerakan perempuan Filipina yang telah berkolaborasi dengan gerakan sosial. Hingga kemudian telah mampu menumpas

berbagai isu terkait bias gender, salah satunya yaitu GABRIELA Women's Party (GWP), yang mana merupakan suatu partai atau gerakan sosial perempuan yang anti diktator. GWP saat ini masih berkiprah di Filipina dan turut menciptakan parlemen. Bahkan pada kongres 17 2016 GPW mendapatkan suara 1.367.795 juta atau sekitar 4,22% penduduk Filipina, yang mana dapat dikatakan partisipasi perempuan dalam parlemen sudah mendapatkan banyak simpati dan dukungan. Sedangkan di Indonesia sendiri jumlah keterwakilan perempuan di Indonesia yang telah disediakan 30%, akan tetapi adanya angka tersebut belum sepenuhnya sesuai pada saat implementasinya. Bahkan partisipasi perempuan dalam DPR RI hanya sekitar 120 orang, dan hanya 20,87% dari total keseluruhan kursi yang tersedia 575 kursi legislatif. Tentunya kedepannya diharapkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dapat mencapai 30% bahkan dapat meningkat seperti Filipina.

Dalam bidang pendidikan Indonesia dapat dikatakan jauh lebih unggul daripada Filipina, hal tersebut terlihat dari Indonesia yang mendapatkan peringkat ke 72 PISA 2018 sedangkan Filipina yang menempati peringkat ke 77. Meskipun tingkat membaca Indonesia

mampu mengungguli negara Filipina akan tetapi hal tersebut harus dievaluasi lebih baik lagi, terutama untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia.

Terlepas dari hal tersebut terdapat kesamaan dalam keinginan perempuan Indonesia dan Filipina yakni keduanya sama-sama ingin berperan dalam partai politik yang dilandasi oleh kepentingan kaum perempuan itu sendiri. di Indonesia sendiri pemikiran tersebut dipengaruhi oleh kaum intelektual, dan banyaknya kemunculan LSM dan berbagai organisasi perempuan yang bersifat formal dan non formal yang dapat menampung berbagai aspirasi dan partisipasi perempuan ke arah pembangunan diri dan politik kearah yang lebih positif. Aktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam partai politik, dipengaruhi oleh pendidikan, melalui pendidikan tersebut yang kemudian dapat menentukan keaktifan kaum perempuan untuk terlibat dalam partai politik. Sedangkan di Filipina sendiri kaum intelektual yang tergabung dalam organisasi mengadakan banyak kegiatan, pelatihan dan memberikan gagasan kepada kaum perempuan di Filipina untuk dapat memperjuangkan haknya. Selain itu bantuan dan bimbingan dari politisi perempuan yang datang juga turut memberikan pendidikan keahlian dan pengalaman mereka.

Berdasarkan konflik dalam sistem politik Filipina dapat dikatakan jauh lebih baik, dibandingkan Indonesia. Hal tersebut terlihat dari Indonesia sendiri, yang seringkali terjadi konflik antar calon pemimpin-pemimpin politik. Tak sedikit para calon pemimpin yang bersaing dengan cara kotor untuk memperebutkan suatu kekuasaan. Sedangkan di Filipina sendiri sudah tidak terlihat konflik dalam sistem politik, dan sudah terlihat kompetisi antara perempuan dan laki-laki dalam memperebutkan dukungan masyarakat. Hal tersebut karena perempuan berhak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam berpartisipasi setara dengan laki-laki. Bahkan keunggulan tersebut terlihat dari peringkat Global Gap Gender, yang mana peringkat kesetaraan perempuan dan laki-laki Filipina selalu mendapat peringkat yang jauh lebih tinggi dari Indonesia.

Akan tetapi Filipina telah mengalami penurunan peringkat, yang sebelumnya 2015-2016 peringkat 7 menurut Global Gap Gender, kemudian menurun menjadi 17. Hal serupa pun terjadi Indonesia yang mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2016 ada pada peringkat 88 kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 101. Maka dari itu Indonesia dan Filipina perlu melakukan evaluasi kembali

dalam hal kesetaraan gender dikarenakan pada tahun 2021 mendapat penurunan yang signifikan. Perbaikan kesetaraan gender perlu dilakukan karena peran perempuan cukup penting dalam partai politik, mereka pun perlu memperhatikan kepentingan politik perempuan dan tidak mengambil risiko bahwa kepentingan mereka akan kalah nilainya dengan kepentingan laki-laki.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa diperlukan perbaikan sistem partisipasi politik perempuan dan sistem demokrasi. Sehingga kedepannya dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender antara Indonesia dan Filipina menjadi lebih baik lagi.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Perbaikan kualitas pendidikan terutama fasilitas sekolah dan peningkatan mutu guru. Serta melakukan upaya dalam mengurangi angka putus sekolah.
2. Mengadakan program pelatihan kapabilitas yang secara khusus menjawab kebutuhan calon politisi/ legislator perempuan yang terbuka untuk umum, sehingga memberikan bekal bagi perempuan dalam memimpin dan berkontribusi dalam pemerintah
3. Pemerintah perlu menerapkan

kebijakan yang tegas terutama terhadap pelecehan ditempat kerja.

4. Membuat dan menerapkan kebijakan kuota keterwakilan perempuan dalam partai politik dan parlemen.
5. Mengerahkan semua elemen masyarakat dalam mendukung perempuan untuk dalam partai politik.
6. Membuat kebijakan yang adil sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
7. Memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menyampaikan aspirasinya bagi perubahan negara.
8. Perbaikan sistem dan tata kelola pemilihan umum / pilkada agar lebih kondusif, sistematis dan efisien, sehingga mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, C. N. Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender Di Filipina.
- Statistik, B. P. (2020). Badan pusat statistik. Badan Pusat Statistik. Statistik Pendidikan 2020. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/27/347c85541c34e7dae54395a3/statistik-pendidikan-2020.html>

- FES Dialogue on Globalization FES International Policy Analysis Unit FES Journal-International Politics and Society Participation of Women in Philippine Politics and Society: A Situationer. (n.d.).
- Hega, M. D., Alporha, V. C., & Evangelista, M. S. (2017). Feminism and the Women's Movement in the Philippines. *Friedrich Eberto Stiftung*.
- Ikmal, M. (2019). Afiriasi Partai Politik Meningkatkan Partisipasi Perempuan: Sebuah Studi di Kabupaten Sumenep. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 306-321.
- Kario, S. (2017). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN 2016 (Studi Di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *JURNAL POLITICO*, 6(1).
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Lundgren, S. S., & Petrosiute, V. (2017). Women's political representation in the Philippines: A study about gender equality in the government of the Philippines.
- Nashr, A. (2019). *Studi korelasi antara kesenjangan Gender terhadap Indeks Demokrasi di Filipina pada tahun 2010-2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25-34.
- Authority, P. S. (2018). Philippine statistics authority. Retrieved from *Philippine Statistics Authority Web site: https://psa.gov.ph/pressreleases/id/1359*
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Proserpina Domingo Tapales, (n.d.). ONCE MORE WITH PASSION: FILIPINO WOMEN AND POLITICS
- Puspitasari, F. (2019). Peran gabriela Women's party dalam mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap perempuan di filipina tahun 2004–2016 (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Sara Souad, V. L. (2016). Women's political representation in the philippines– a study about gender equality in the government. *HOGSKOLANI BORAS*, 20-35.
- Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations. oecd Publishing.
- Suriyanto, P. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik pada Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Tahun 2015.

- Women, P. C. (2019). Enacting a Women's Political Participation and Representation Law. Womens Priority Legislative Agenda for the 17th Congress, (pp. 1-4).
- World Economic Forum. (2015). The Global Gender Gap Report 2015: Rankings.
- World Economic Forum. (2016). The Global Gender Gap Report 2016: Rankings.
- World Economic Forum. (2021). The Global Gender Gap Report 2021: Rankings.
- Zapata, A. (2018). Women's leadership and political participation: Fair access to political spheres in the Province of Bulacan, Philippines. *African Educational Research Journal*, 6(4), 334–341.  
<https://doi.org/10.30918/AERJ.64.18.102>.